

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Baharudin Lopa. 2001. *Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*. Jakarta
- Bambang Sunggono. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Eva Achjani Zulfa. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Heri Herdiawanto. 2010. *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Irvan Mawardi. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*. Yogyakarta:Mahakarya Rangkang Offset
- Jimly Asshiddiqie. 2012. *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Assidiqie. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Bandung: Rajawali Press, Bandung
- Koesparnomo Irsan. 2009. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti
- Lily Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Mukti Fadjar. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Jakarta: Bayu Media
- Panjaitan dan Simorangkir. 1995. *LAPAS dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Refly Harun. 2016. *Pemilu Konstitusional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rozali Abdullah. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Demokratis*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01.Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Lembaga Permasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.

C. Jurnal dan Website

Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu *www. Journal.kpu.go.id*

Halawa ,Metiba dan Ignatius Adiwidjaja.2016. *Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU)*. [internet]. [diunduh 2020 Sep 1]. Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications/103083-ID-analisis-kinerja-komisipemilihan-umum-k.pdf>

Jurnal Ilmiah Muqadimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora tentang Jaminan Hak Pilih Bagi Narapidana pada Pemilu 2019 di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru

<https://kpu-tanahdatarkab.go.id/visi-misi/>

<https://kpu-tanahdatarkab.go.id/struktur/>

<http://infopublik.id/read/262892/komnasham-minta-ada-tps-khusus-dan-regulasi-bagi-pemilihlapas.html>

Rodrigo F. Elias dan Ruddy Watulingas, *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 4, Juni 2018

Yosi Dewi Mahayanthi, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM*